

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian pernyataan atau tindakan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh suatu pemerintah, organisasi, atau entitas lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa berupa aturan, pedoman, atau langkah-langkah yang dirumuskan sebagai respons terhadap situasi atau isu tertentu. Tujuan kebijakan dapat bervariasi, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan dapat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap efektivitasnya juga merupakan bagian integral dari siklus kebijakan.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya

seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud- maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Nur, 2021) .

Menurut Arwildayanto bahwa Kebijakan tidak hanya mencakup pengaturan internal sistem, tetapi juga menetapkan hubungan definitif antara berbagai sistem. Oleh karena itu, kebijakan dapat dianggap sebagai pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar tindakan, arah tindakan spesifik, program untuk aktivitas tertentu, atau rencana. Kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, yang dapat bervariasi dari yang sederhana hingga kompleks, umum hingga spesifik, kualitatif hingga kuantitatif, serta bisa bersifat publik atau privat. Dalam pengertiannya seperti ini, kebijakan dapat berupa pernyataan tentang dasar tertentu, arah tindakan, program untuk kegiatan tertentu, atau rencana (Arwildayanto dkk., 2018).

Nur juga menjelaskan secara konseptual, ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi

masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan (Nur 2021). Namun kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi masih banyak terjadi mengenai kebijakan. Beberapa orang mengartikan *policy* dalam artian kebijaksanaan, yang memiliki makna berbeda sekali dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi yang bersifat formal (Arwildayanto dkk., 2018).

Dari berbagai pemahaman tentang kebijakan yang disampaikan oleh para pakar dan tokoh manajemen, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah peraturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari sebuah organisasi, yang memiliki sifat mengikat dan mengatur perilaku individu dengan tujuan menciptakan norma-nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan menjadi pedoman utama bagi anggota organisasi atau masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan memiliki sifat sebagai alat penyelesaian masalah dan proaktif, berbeda dengan hukum dan regulasi, serta lebih adaptif dan terbuka terhadap interpretasi. Meskipun mengatur apa yang diperbolehkan dan tidak, kebijakan juga diharapkan tetap mempertahankan karakteristik lokal yang spesifik, memberikan kesempatan untuk diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam model rasional, asumsi tentang kebijakan memiliki status khusus sebagai elemen yang relatif stabil

dalam uji konsistensinya. Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, atau kebijakan pemasaran, kebijakan pendidikan, dimana seolah-olah istilah itu menunjukan kebijakan lokal dari suatu tema universal, cara manipulasi lingkungan eksternal dari organisasi, dan menggunakan tindakan bertujuan tertentu.

b. Fungsi Kebijakan

Faktor yang menjadi penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah implementasi kebijakan organisasi yang efektif, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata. Esensi dari kebijakan adalah keputusan yang mencakup tujuan, prinsip, dan aturan. Biasanya, kebijakan dicatat dan dituliskan sebagai panduan bagi pimpinan, staf, dan anggota organisasi, serta berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Proses pembuatan kebijakan merupakan cara untuk memperolehnya.

Fungsi kebijakan secara umum adalah memberikan arah, aturan, dan panduan untuk mengatur perilaku, mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan dan kepentingan tertentu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi umum dari kebijakan (Nur, 2021):

- 1) Pengaturan Perilaku. Kebijakan digunakan untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi agar sesuai dengan nilai, norma, dan tujuan yang diinginkan.

- 2) Pencapaian Tujuan. Kebijakan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam konteks pemerintahan, ekonomi, pendidikan, atau bidang lainnya.
- 3) Penyelesaian Masalah. Kebijakan sering kali dibuat sebagai respons terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu entitas. Tujuannya adalah memberikan solusi atau mitigasi terhadap masalah tersebut.
- 4) Pengaturan Sumber Daya. Kebijakan mengatur penggunaan dan distribusi sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan lainnya. Ini dapat mencakup kebijakan anggaran, pajak, dan subsidi.
- 5) Perlindungan Hak dan Kepentingan. Kebijakan dapat dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Contohnya adalah kebijakan hak asasi manusia atau kebijakan perlindungan konsumen.
- 6) Pembentukan Norma dan Nilai. Kebijakan dapat membentuk norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dengan mengajarkan atau mendorong perilaku tertentu.
- 7) Mendukung Kepastian Hukum. Kebijakan memberikan kerangka hukum yang memastikan konsistensi dan kepastian dalam mengambil keputusan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan kestabilan.

- 8) Pemberdayaan dan Perubahan Sosial. Kebijakan dapat menjadi alat untuk memberdayakan individu atau kelompok yang lebih lemah dan untuk mendorong perubahan sosial positif.
- 9) Peningkatan Kinerja Organisasi. Di tingkat organisasi, kebijakan membantu mengelola dan meningkatkan kinerja dengan memberikan panduan yang jelas kepada anggota organisasi.
- 10) Respons terhadap Perubahan. Kebijakan dapat diubah atau disesuaikan untuk merespons perubahan kondisi, perkembangan, atau kebutuhan dalam masyarakat atau organisasi.

2. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan sering kali didengar dan dilaksanakan, tetapi sering kali tidak sepenuhnya dipahami. Baik istilah "kebijakan" maupun "pendidikan" memiliki makna yang sangat luas dan beragam. Kebijakan pendidikan sebenarnya berasal dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yang menyatukan teori dan praktik pendidikan untuk mengatur kehidupan manusia terkait dengan kebutuhan layanan pendidikan guna meningkatkan kecerdasannya. Pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, banyak pihak juga memahami kebijakan pendidikan sebagai kumpulan hukum atau perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup didalamnya tujuan, proses, evaluasi dan tindak lanjut pendidikan supaya tidak terjadi benturan konflik (*conflict*

interest) antar warga Negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya (Arwildayanto dkk., 2018)

Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia (Nasihi dkk., 2022). Kebijakan pendidikan menjadi elemen kunci untuk keunggulan dan bahkan kelangsungan hidup suatu negara dalam persaingan global, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan sebagai respons terhadap berbagai masalah pendidikan. Kebijakan ini bertindak sebagai panduan dan solusi inovatif untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan..

b. Aspek – aspek dalam Kebijakan Pendidikan

(Elwijaya dkk., 2022) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu:

1) *Goal* (Tujuan).

Tujuan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu. Tujuan dianggap sebagai langkah awal dalam perencanaan suatu kegiatan. Penting

bagi sebuah kebijakan pendidikan untuk memiliki tujuan yang jelas agar implementasinya dapat terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dirancang dengan rasionalitas agar dapat diterima dengan baik oleh berbagai pihak.

2) *Plans* (Rencana).

Setelah menetapkan tujuan pendidikan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana kerja dibuat untuk mengelola dan menerapkan kebijakan pendidikan sehingga proses implementasinya menjadi terarah dan jelas.

3) *Programme* (Program).

Setelah pembuatan rencana kerja, langkah berikutnya adalah mengembangkan program. Program ini adalah serangkaian aktivitas yang konkret yang dibangun berdasarkan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Program bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengevaluasi tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

4) *Decision* (Keputusan).

Keputusan merupakan langkah tindakan dalam menetapkan tujuan, menyusun rencana program, melaksanakan program, dan mengevaluasi program. Pengambilan keputusan ini didasarkan

pada evaluasi hasil dari uji coba terhadap berbagai alternatif kebijakan pendidikan. Keputusan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada pertimbangan rasional agar dapat diterima oleh berbagai pihak.

5) *Effects* (Dampak).

Dampak adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan yang bisa disengaja atau tidak disengaja, baik dalam bentuk dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Komponen-komponen ini membentuk dasar dari kebijakan pendidikan.

Tanpa keberadaan salah satu dari komponen tersebut, kebijakan pendidikan tidak akan berhasil. Kelima komponen ini saling terkait dan mendukung satu sama lain.

c. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut (Hafidati, 2020) kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu :

- 1) Memiliki tujuan pendidikan, Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal-formal, Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan

secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

- 3) Memiliki konsep operasional, Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- 4) Dibuat oleh yang berwenang, Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- 5) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan juga harus responsif terhadap kondisi aktual untuk diperbaiki atau ditingkatkan jika efektif, atau disesuaikan jika terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan evaluasi yang mudah dan efektif terhadap implementasinya.

- 6) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem yang memerlukan struktur yang jelas untuk mengatur semua aspek yang relevan. Sistem ini harus efektif, efisien, dan berkelanjutan agar tidak hanya pragmatis dan diskriminatif, tetapi juga kokoh secara struktural, tanpa konflik antara berbagai faktor yang terlibat. Penting untuk memperhatikan hal ini secara seksama agar penerapannya tidak menghasilkan kecacatan hukum internal. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya secara eksternal.

d. Dampak Kebijakan dalam Pendidikan

Dampak kebijakan dalam dunia pendidikan dapat sangat luas dan beragam, dan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk masa depan generasi mendatang serta masyarakat secara keseluruhan. Menurut Rozak (2021) terdapat beberapa pengaruh dari kebijakan dalam dunia pendidikan diantaranya:

1) Aksesibilitas Pendidikan

Kebijakan pendidikan dapat memengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa. Kebijakan yang mendukung pendidikan gratis, beasiswa, atau transportasi sekolah dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

2) Kualitas Pendidikan

Kebijakan pendidikan juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah. Standar pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat mencakup pelatihan guru, peningkatan kurikulum, atau investasi dalam fasilitas pendidikan.

3) Keseimbangan Antara Pendidikan Akademik dan Non-Akademik:

Kebijakan pendidikan dapat memengaruhi keseimbangan antara pendidikan akademik dan non-akademik. Upaya untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat dapat tercermin dalam kebijakan pendidikan.

4) Pemberdayaan Guru

Kebijakan pendidikan dapat memengaruhi kondisi kerja dan pemberdayaan guru. Kebijakan yang mendukung pelatihan dan pengembangan profesional, serta memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran, dapat meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa.

5) Partisipasi Siswa dan Orang Tua

Kebijakan pendidikan juga dapat memengaruhi partisipasi siswa dan orang tua dalam pengambilan keputusan dan proses belajar. Ini dapat mencakup program pengembangan

kepemimpinan siswa, penghargaan atas partisipasi siswa, atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

6) Lingkungan Sekolah yang Aman dan Inklusif

Kebijakan pendidikan juga dapat memengaruhi lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan semua siswa. Kebijakan anti-perundungan, program inklusi, dan upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan siswa dan hasil belajar mereka.

3. Sekolah Ramah Anak

a. Pengertian Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah sebuah program sekolah yang menjunjung tinggi perkembangan psikologis peserta didik. Pelaksanaan sekolah ramah anak sudah banyak dilakukan dalam program pendidikan di berbagai Negara, dan tidak terkecuali Negara Indonesia. Tujuan utama diadakannya program sekolah ramah adalah sebagai kebijakan hukum pemerintah yakni perlindungan terhadap anak (Artadiani dkk., 2019). Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan.

Selain itu, tujuan dilaksanakannya program sekolah ramah anak terutama di Negara Indonesia adalah agar semua anak mendapatkan hak mereka untuk menuntut ilmu meskipun ada kekurangan yang dimiliki. Jadi dengan adanya program ini semua anak merasa tidak adanya diskriminasi antara dirinya dengan anak normal yang lainnya, karena mendapatkan hak yang sama (Mulyasa, 2021). Menurut Vita Putri Oktaviani dan Riswanda (2024) dalam konteks Program Sekolah Ramah Anak, terdapat sekolah inklusif yang menekankan pentingnya pendidik memiliki keterampilan tambahan untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Pendidikan yang ramah anak mengutamakan kasih sayang dan bukan kekerasan, pujian daripada umpatan, asah, asih, dan asuh, dan menghindari kekerasan atau intimidasi (Desty, Muljanah, dan Windasari 2024). Sekolah Ramah Anak dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. Sekolah Ramah Anak adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi Sekolah Ramah Anak adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak. (Rosalin, 2020).

b. Prinsip Sekolah Ramah Anak

Menurut Hisyam (2019) Pembentukan dan Pengembangan

SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah;
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

c. **Komponen Sekolah Ramah Anak**

Dalam Buku Pedoman Sekolah Ramah Anak (Rosalin, 2020) dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah bagi anak, ada 6 komponen yang harus dipenuhi yaitu:

1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah komitmen dari wilayah dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak-anak. Hal ini diwujudkan melalui deklarasi, Surat Keputusan dari tim Sekolah Ramah Anak, Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah, dan kebijakan sekolah lainnya yang berorientasi pada kepentingan anak.

2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih

Minimal harus ada dua pendidik atau tenaga kependidikan yang telah menerima pelatihan tentang Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak. Ini adalah tanggung jawab daerah untuk mengubah satuan pendidikan yang memiliki keinginan menjadi sekolah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak.

3) Proses Belajar yang Ramah Anak

Menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak proses belajar dan mengajar

diupayakan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Untuk memenuhi komponen ke tiga ini sangat tergantung kreativitas dan inovasi yang dilakukan satuan pendidikan

4) Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Sarana dan prasarana yang ramah anak, merupakan faktor pendukung berupa materil yang secara khas dimiliki oleh program ini. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman bagi anak (Violeta dan Lessy 2024). Memastikan keamanan dan kenyamanan sarana prasarana di sekolah merupakan hal yang penting, termasuk pemasangan rambu peringatan di area berbahaya, merapikan ujung meja, menjaga kebersihan toilet dengan pasokan air yang lancar, serta menyediakan pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai, dan lain sebagainya. Komponen ini menekankan pentingnya memastikan bahwa lingkungan sekolah tidak membahayakan anak, tanpa memandang apakah satuan pendidikan tersebut mewah atau sederhana. Selain itu, melibatkan orang tua dan anak dalam merancang sarana prasarana untuk mencegah bahaya sangat disarankan, agar tercipta rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekolah dari kedua belah pihak.

5) Partisipasi Anak

Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi Sekolah Ramah Anak. Anak dijadikan sebagai pengawal Sekolah Ramah Anak dan *peer educator*. Hal ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Dalam melaksanakan pemenuhan 6 komponen Sekolah Ramah Anak, maka sejak satuan pendidikan “MAU” atau berkomitment untuk melaksanakan SRA, anak harus dilibatkan dari mulai menyusun kembali tata tertib, mengisi daftar periksa potensi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung Sekolah Ramah Anak , misalnya menjadi “Duta Sekolah Ramah Anak”. Hal ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah ramah Anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sekolah ramah anak mendukung partisipasi aktif anak-anak dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait hak dan perlindungan mereka.(Ruswanti, Jannah, dan Matheus Lasarus Malaikosa 2024)

6) Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, *Stakeholder* lainnya dan Alumni.

Peran dan keterlibatan orang tua memiliki peranan yang sangat vital dalam konteks Sekolah Ramah Anak, karena tiga

kelompok yang memainkan peran sentral dalam inisiatif tersebut adalah satuan pendidikan, anak-anak, dan orang tua. Melibatkan orang tua sejak tahap persiapan dan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, termasuk menyelaraskan disiplin di keluarga sebagai lingkungan pertama anak, akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, partisipasi dari alumni, organisasi masyarakat, dan dunia usaha juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Partisipasi dari kelompok-kelompok tersebut dapat berupa bantuan sarana atau kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Sekolah Ramah Anak.

4. Perundungan

a. Pengertian Perundungan

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kekerasan tersebut berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis, dan sosial. (Susandi dkk. 2024) Perundungan merupakan suatu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dimana ditunjukkan dalam berbagai atau beragam bentuk (Putri 2022). Menurut Naili Sa'ida, Perundungan merupakan perilaku verbal, fisik, atau sosial yang tidak menyenangkan di dunia nyata dan maya yang membuat seseorang merasa terluka, tidak

nyaman, dan tertekan baik oleh individu ataupun kelompok nyata yang ada (Kurniawati and Wahyuni 2023).

b. Aspek Perundungan

Perundungan terbagi menjadi tiga bagian, yakni Perundungan verbal, fisik, dan psikologis (Fatikasari and Reza 2021). Penjelasan rinci dari ketiga bagian perundungan tersebut yakni

1) Perundungan Verbal

Perundungan verbal adalah bentuk perilaku yang umum terjadi, dengan tingkat kejadian mencapai sekitar 70%. Perundungan verbal seringkali terjadi tanpa disadari, dianggap sebagai percakapan biasa yang tidak menarik perhatian dari teman sekitar. Peristiwa ini seringkali terjadi dengan cepat dan tanpa kesadaran dari pelaku, namun dapat menyebabkan luka atau rasa sakit emosional pada korban. Tindakan perundungan dapat meliputi memberikan julukan, mencela, menyebarkan fitnah, mengkritik dengan keras, menghina secara pribadi atau umum, memberikan pernyataan seksual yang merendahkan, mencuri uang atau barang, melakukan panggilan kasar, mengirim pesan intimidasi melalui *e-mail*, mengancam dengan surat kaleng, menuduh dengan tuduhan palsu, atau menyebarkan informasi palsu atau *hoax*. Perundungan verbal seringkali merupakan awal dari penindasan yang lebih lanjut, yang dapat berkembang menjadi penindasan fisik dan sosial, serta merupakan langkah awal menuju

tindakan yang lebih kejam atau penindasan yang merendahkan martabat.

2) Perundungan Fisik

Perundungan fisik adalah bentuk perundungan yang jelas terlihat dan mudah diidentifikasi. Namun, meskipun mudah dikenali, hanya sekitar sepertiga dari kasus yang dilaporkan oleh siswa. Tindakan perundungan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korban meliputi pemukulan, penjepitan leher, peninjauan, tendangan, gigitan, pencakaran, meludahi korban, menekuk anggota tubuh hingga menyebabkan rasa sakit, serta merusak atau menghancurkan pakaian atau barang milik korban. Meskipun tindakan perundungan fisik ini mungkin tidak dimaksudkan untuk menyebabkan cedera serius pada korban, namun dapat menjadi semakin berbahaya, tergantung pada perilaku pelaku perundungan tersebut. Semakin dewasa pelaku, semakin berbahaya perilakunya. Individu yang sering melakukan perundungan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki masalah yang mendalam dengan pelaku perundungan lainnya. Dampak dari perlakuan tersebut dapat menyebabkan individu tersebut terlibat dalam perilaku kriminal.

3) Perundungan Psikologis

Perundungan psikologis adalah tindakan yang bertujuan untuk merendahkan harga diri korban dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari korban. Tindakan menghindari

korban merupakan bentuk relasional yang paling dominan, di mana korban ditinggalkan karena tersebar berita buruk tentang mereka sehingga tidak ada teman yang ingin bersosialisasi dengan mereka. Perundungan relasional seringkali dimaksudkan untuk mengisolasi individu, menolak mereka, dan merusak hubungan persahabatan secara sengaja. Tindakan ini dapat berupa ekspresi kasar seperti mengedipkan mata, menghela napas, mencibir, menertawakan, mengolok-olok, dan menunjukkan perilaku agresif melalui gerakan tubuh.

c. Faktor Penyebab Perundungan

Menurut Widamar dkk. (2023) terdapat beberapa faktor yang mendorong akan adanya tindak perundungan, diantaranya:

1) Pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan

Orang-orang yang pernah melihat dan mengalami kekerasan di rumah memiliki risiko yang lebih besar untuk mengintimidasi orang lain. Jika seorang anak atau anggota keluarga melakukan bullying, jangan cepat menghakimi mereka. Cari tahu apakah mereka memiliki masalah internal dengan keluarga mereka. Jika demikian, cobalah untuk menawarkan dukungan dan bimbingan kepada mereka.

2) Memiliki orang tua yang bersifat permisif

Orang tua yang permisif diduga menjadi salah satu penyebab mengapa bullying bisa terjadi. Hal ini dikarenakan,

orang tua tipe ini biasanya tidak membuat aturan yang dapat mengontrol anaknya untuk melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk melakukan perundungan di luar rumah.

3) Kurangnya hubungan dengan orang tua

Kurangnya hubungan komunikasi antara orang tua dan anak akan menyebabkan faktor pembullying terjadi. Ketika Anda memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua Anda, anak Anda diharapkan untuk berempati dan merasakan kasih sayang. Dengan begitu dia tidak akan melakukan pembullying, dikarenakan sudah mendapatkan rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia.

4) Memiliki saudara kandung yang abusif

Anak-anak yang memiliki saudara kandung yang kasar atau yang sering melakukan kekerasan fisik meniru tindakan saudaranya. Juga, intimidasi dapat membuat anak Anda merasa tidak berdaya. Akhirnya, untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi, mereka melampiaskannya pada orang lain di luar rumah.

5) Haus akan kekuasaan

Anak-anak yang selalu haus akan kekuasaan dan tetap ingin memerintah biasanya juga cenderung melakukan tindakan bullying. Mereka hanya mau bekerja sama jika orang lain mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, mereka mungkin mulai mengintimidasi.

6) Ingin menjadi populer di lingkungannya

Anak-anak yang ingin dikenal atau populer di kalangannya dianggap berisiko mengalami perundungan. Mereka menunjukkan bagaimana mereka ingin memerintah, mendominasi, dan menantang teman mereka untuk popularitas dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka.

7) Menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi

Anak-anak dapat menggunakan tubuh besar dan fisik yang kuat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui perundungan. Mereka mengendalikan situasi dengan membuat anak-anak lain merasa lemah.

8) Dorongan untuk bisa berbaur dengan teman-teman

Salah satu alasan untuk berhati-hati terhadap intimidasi sekolah adalah keinginan untuk terhubung dengan teman sebaya. Keinginan bersosialisasi ini dapat menyebabkan anak menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan di sekolah, termasuk kekerasan dan perundungan. Faktanya, anak-anak yang diintimidasi agar cocok dengan teman sebayanya mungkin merasa tidak nyaman dengan perilaku buruk mereka. Hanya saja mereka rela melakukannya agar bisa diterima oleh teman-temannya di sekolah.

d. Dampak Perundungan

Tindak perundungan memiliki dampak yang buruk bagi korban, pelaku, dan masyarakat, yakni masyarakat terdekat dan masyarakat secara luas. Menurut Maritim (2023) hal – hal negatif yang muncul ketika perundungan terjadi pada lingkungan sekolah diantaranya:

1) Korban

- a) Bagi korban perundungan verbal, seringkali mengalami perasaan rendah diri, kehilangan rasa percaya diri, kesulitan berpikir, depresi, serta penurunan kemampuan belajar. Dampak perundungan bisa terlihat dengan jelas pada beberapa kasus, sementara pada kasus lain, dampaknya mungkin berkembang secara bertahap sehingga menjadi lebih nyata bagi orang lain yang memperhatikan. Anak yang mengalami masalah atau gangguan seringkali mudah dikenali oleh guru karena mereka berinteraksi hampir setiap hari dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Beberapa kasus bahkan dapat menyebabkan depresi yang parah, bahkan hingga menyebabkan niat untuk bunuh diri karena tidak mampu mengatasi masalah mereka sendiri.
- b) Bagi korban perundungan fisik akan mengalami luka pada bagian tubuh, baik luka ringan, sedang, maupun luka yang tergolong berat, lemahnya ketahanan tubuh, perasaan khawatir berlebihan, merasa tidak aman, takut, trauma, baik kategori

trauma ringan maupun berat, rasa sakit dan teraniaya, serta hilangnya minat dalam belajar. pada beberapa kasus yang terjadi ada yang tidak berangkat sekolah sehari-hari sampai pindah sekolah dengan alasan takut terluka dan trauma lebih parah.

- c) Bagi korban perundungan relasional akan muncul rasa tidak nyaman, bingung, ragu-ragu dalam bertindak, sulit berpikir, kecenderungan anak yang mengalami perundungan relasional akan merasa kesulitan memecahkan masalahnya sendiri karena dipenuhi rasa ragu, bersalah, bertanya-tanya dalam diri, serta sulit bersosialisasi dengan teman karena takut menghadapi penolakan.
- d) Korban perundungan elektronik dapat mengalami dampak negatif, seperti meniru perilaku buruk yang mereka lihat di media elektronik, seperti menggunakan kata-kata kasar atau kotor, meniru perilaku pornografi, mengikuti lelucon yang menyakiti orang lain, menjadi korban penipuan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, ada yang bahkan mengalami kehilangan selama beberapa hari dan ditemukan dalam keadaan meninggal karena mengikuti perintah dari pelaku untuk bertemu di suatu tempat.

2) Pelaku

Pelaku perundungan akan menghadapi sejumlah masalah selama mereka terus melakukan tindakan perundungan terhadap teman atau individu lainnya. Masalah yang timbul termasuk menjadi dianggap sebagai anak nakal, kurang memiliki karakter, sombong, pemecah masalah, dan cenderung hanya memiliki teman sebaya yang memiliki kecenderungan yang sama. Mereka seringkali terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak kriminal, dan merasa menjadi tokoh yang ditakuti oleh teman-temannya, yang membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuasaan dan tidak dapat ditandingi.

3) Masyarakat

Dampak negatif juga dapat dirasakan oleh masyarakat, baik yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku maupun yang tidak terlibat langsung. Bagi orang-orang yang dekat dengan pelaku, mereka mungkin merasa tidak aman karena takut menjadi sasaran selanjutnya dari perundungan. Beberapa teman yang menyaksikan perundungan mungkin ikut meniru perilaku tersebut terhadap korban dengan harapan dianggap sebagai teman dekat oleh pelaku dan merasa dilindungi dari kemungkinan menjadi korban selanjutnya. Mereka mungkin sengaja meniru perundungan untuk menunjukkan kekuatan dan menjadi intimidatif di masa depan, sehingga mereka tidak menjadi sasaran perundungan.

Bagi orang-orang yang melihat perundungan, mereka mungkin merasa bahwa hal itu sudah biasa dan tidak menganggapnya sebagai masalah serius, yang menyebabkan banyak dari mereka menutup diri terhadap kasus-kasus perundungan tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang. Dampaknya adalah semakin banyak kasus perundungan yang terjadi dan sulit dikendalikan.

B. Hasil Penelitian Tedahulu

Penelitian terdahulu atau yang sering disebut juga sebagai literatur penelitian, merujuk pada studi atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang tertentu. Ini mencakup publikasi ilmiah, artikel, tesis, buku, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya :

1. Tizaka (2023) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya (Studi pada SDN KEDUNGORO V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying)”. Subjek dari penelitian ini adalah guru, tenaga pendidik dan pihak sekolah serta administrasi sekolah yang tergabung dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SDN KEDUNGORO V. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya sudah memberikan dampak positif dalam

menghadirkan lingkungan sekolah yang terbebas dari bullying dan kekerasan fisik. Akan tetapi, ada sejumlah masalah yang terdapat pada implementasi program, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan finansial. Meskipun terdapat upaya dalam melatih tim pelaksana Sekolah Ramah Anak, namun masih terdapat kendala dalam menerapkan konsep tersebut secara optimal.

Penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama – sama membahas seputar program Sekolah Ramah Anak, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut yaitu menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan fisik dan bullying. Peneliti fokus melakukan penelitian mengenai implemetasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam menanggulangi perundungan di Sekolah Dasar.

2. Qamaria dkk. (2023) dengan judul “Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying”. Subjek penelitian ini adalah siswa di SDN X. Hasil penelitian ini yakni untuk mengedukasi siswa tentang bahaya aksi bullying, kemudian dampak yang diakibatkan ketika melakukan bullying, serta meminimalisir dan menghilangkan aksi bullying di tingkat Sekolah Dasar yang berlokasi di SDN X. Kampanye bullying ini dilakukan dengan cara salah satu tim menampilkan beberapa video yang berhubungan dengan bullying serta dampak yang terjadi. Pada tanggal 15 Juli hingga 18 Agustus 2023 melakukan kampanye stop bullying kepada siswa SDN X kegiatan

meliputi penayangan film pendek tentang bullying serta menampilkan poster di setiap kelas.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama – sama meneliti tentang bullying atau perundungan di sekolah dasar. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Qamaria dkk., (2022) yaitu efektivitas kampanye atau intervensi tertentu dalam mencegah atau mengurangi kasus perundungan di lingkungan sekolah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan tertentu yang telah diadopsi oleh sekolah dasar untuk menangani masalah perundungan.

3. Evianah (2023) “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak”. Subjek penelitian ini adalah orangtua, guru, dan siswa. Hasil dari penelitian ini adalah Sekolah Ramah Anak diperlukan untuk menciptakan dan mentransformasi model sekolah tradisional menjadi sekolah ramah anak yang menghargai hak-hak anak. Model sekolah ini efektif untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya serta mengembangkan potensi siswa. Pelaksanaan pembelajaran ramah anak sudah mengikuti hampir semua indikator. Indikator ini berhasil diterapkan untuk menghormati hak-hak anak.

Perbedaan penelitian ini mungkin lebih fokus pada pentingnya memiliki lingkungan sekolah yang mendukung dan melindungi anak-anak,

tidak hanya dari perundungan tetapi juga dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, atau ketidakadilan lainnya sedangkan fokus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah evaluasi implementasi kebijakan sekolah ramah anak yang telah diadopsi untuk menangani masalah perundungan di sekolah dasar. Tetapi masih memiliki kesamaan yaitu sama – sama membahas seputar Sekolah Ramah Anak

4. Widamar dkk. (2023) “Persoalan Perundungan di Lingkungan Sekolah”. Subjek penelitian ini adalah lingkungan sekolah yang terdapat kasus perundungan. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah fenomena bullying yang ada di sekolah yang mengakibatkan , prestasi akademik menurun, kepercayaan diri merosot, dan terkadang mereka bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Selain itu, bullying juga berdampak negatif pada lingkungan sekolah secara holistik, membentuk suasana yang tidak aman dan tidak kondusif bagi pembelajaran. Penelitian ini pula membahas upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dilema bullying pada lingkungan sekolah. Penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama – sama meneliti tentang kasus perundungan di lingkungan sekolah, namun terdapat perbedaan yakni perbedaan dalam fokus, ruang lingkup, dan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh widamar dkk., dengan peneliti memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana menangani masalah perundungan di sekolah.
5. Maritim (2023) “Pencegahan Dan Upaya Mengatasi Tindak Perundungan Di Sekolah Dasar”. Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai

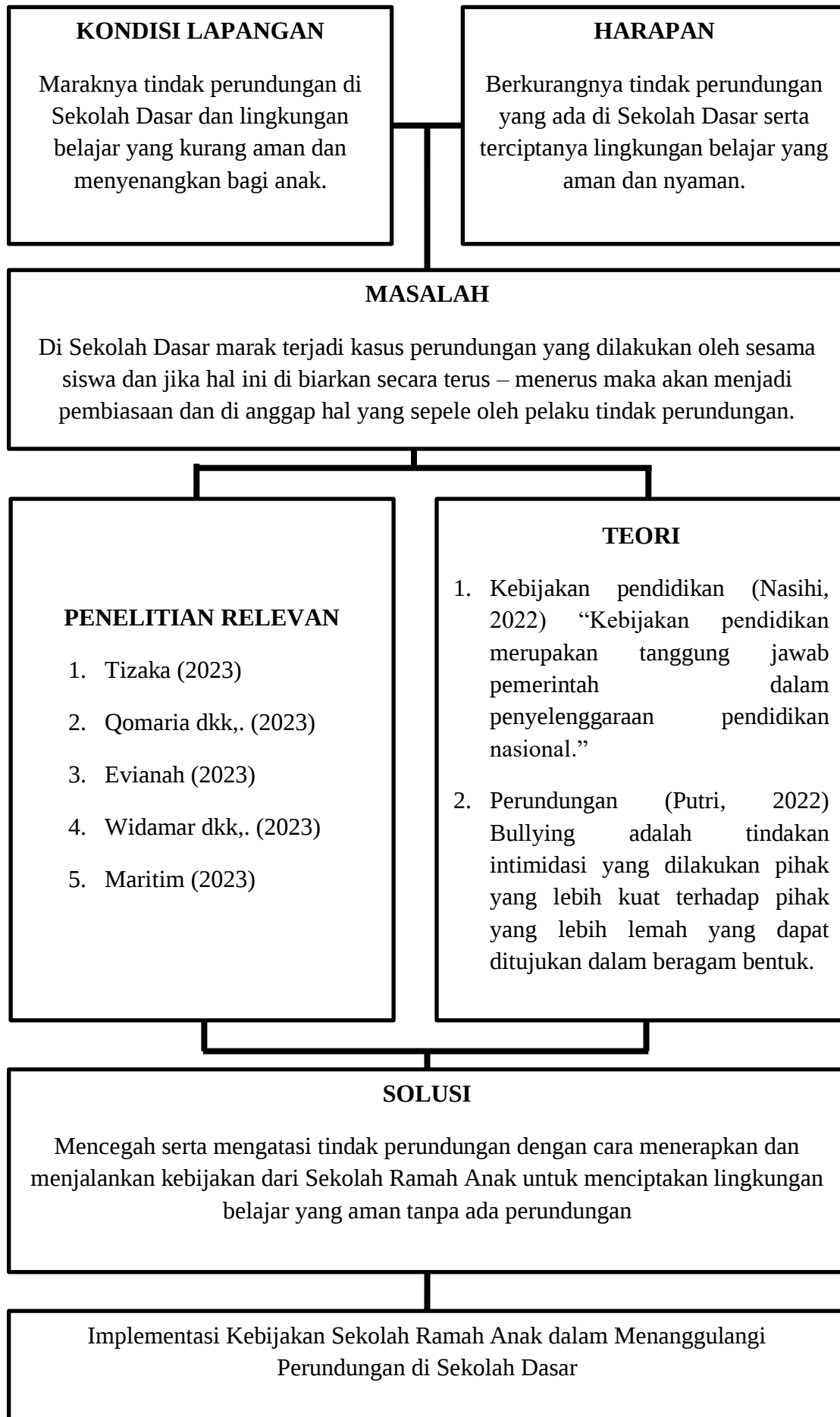
bagaimana cara untuk mencegah dan mengatasi tindak perundungan yang ada di sekolah dasar dengan menggunakan metode *literature review* dimana menggabungkan beberapa pembahasan dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, serta sosial yang kemudian disimpulkan dengan sistematis. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama membahas cara mengatasi tindak perundungan di sekolah dsar, namun terdapat perbebedaan yaitu penelitian ini mungkin lebih fokus pada strategi dan intervensi yang dilakukan di tingkat sekolah dasar untuk mencegah perundungan terjadi atau mengatasi kasus perundungan yang sudah ada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan sekolah ramah anak yang ditujukan secara khusus untuk menangani masalah perundungan di sekolah dasar.

Berdasarkan pemaparan literatur penelitian, Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta kesejahteraan anak – anak secara holistik, baik dari segi akademis maupun aspek emosional dan sosial. Kebijakan dari sekolah harus sesuai dan dijalankan secara baik guna mendukung keberhasilan Sekolah Ramah Anak. Salah satu implementasi dari kebijakan program Sekolah Ramah Anak yaitu berupaya untuk mencegah dan mengatasi tindak bullying yang ada di Sekolah Dasar.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam sebuah skripsi adalah struktur konseptual yang membantu merinci dan mengorganisir pemikiran serta penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir ini memberikan dasar bagi penelitian, memandu penulis dalam merancang metodologi, dan memastikan kohesivitas antara berbagai bagian skripsi. Kerangka berpikir ini membantu penulis dan pembaca untuk memahami struktur logis dan tujuan penelitian. Ini juga membantu peneliti menjaga fokus dan konsistensi sepanjang proses penelitian.

Perundungan adalah masalah serius yang dapat memiliki efek jangka panjang baik pada korban maupun pelaku. Itu bisa terjadi di mana saja, dari sekolah hingga tempat kerja, dan bisa dalam berbagai bentuk baik itu fisik, verbal, atau emosional dan intimidasi. Maraknya kasus perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar membuat kekhawatiran dari pihak sekolah, guru, siswa maupun orang tua. Pemerintah kemudian mengupayakan solusi dalam mengatasi tindak perundungan di Sekolah Dasar dengan membuat kebijakan pendidikan berupa Program Sekolah Ramah Anak yang berorientasi kepada pemenuhan hak – hak anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi di sekolah.



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir